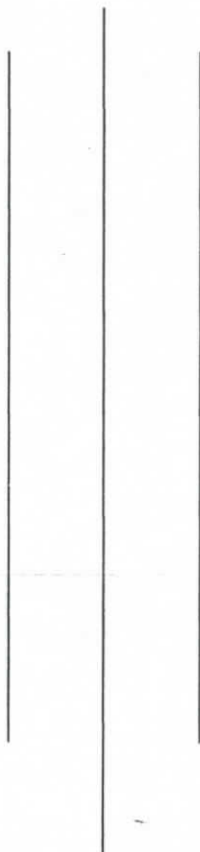




**LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan, sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam usaha mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Jambi, Februari 2021
Inspektur,



H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Laporan Realisasi Anggaran	1
Neraca	2
Laporan Operasional	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR	
PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	10
2.1. Ekonomi Makro	10
2.2. Kebijakan Keuangan.....	10
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	11
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar.....	14
3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	15
3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya	15
3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	15
3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja	16
3.6. Kebijakan Akuntansi Beban	16

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	17
4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca	21
4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	25
4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
BAB V PENUTUP	28

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Februari 2021
Inspektur,



H. AGUS HERIANTO,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 199703 1 004



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.407.500,00	541.600,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.407.500,00	541.600,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.919.621.127,92	7.458.990.224,90
Gedung dan Bangunan	4.191.298.523,44	3.327.112.552,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.970.000,00	19.970.000,00
Aset Tetap Lainnya	23.815.909,00	23.815.909,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(8.898.999.816,42)	(8.996.763.008,29)
JUMLAH ASET TETAP	4.255.705.743,94	1.833.125.677,61
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi		
URAIAN	2021	2020
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	792.796.690,40	792.796.690,40
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(792.796.690,40)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	792.796.690,40
JUMLAH ASET	4.257.113.243,94	2.626.463.968,01
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	16.403.357,00	15.437.250,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.403.357,00	15.437.250,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.403.357,00	15.437.250,00
EKUITAS		
EKUITAS	4.240.709.886,94	2.611.026.718,01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.257.113.243,94	2.626.463.968,01



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah Provinsi

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	29.174.283.754,00	26.754.393.442,00	91,71	25.756.366.324,00
5.1	BELANJA OPERASI	27.443.291.864,00	25.293.762.539,00	92,17	24.685.142.124,00
5.1.1	Belanja Pegawai	14.686.888.811,00	13.921.660.121,00	94,79	13.343.666.307,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.756.403.053,00	11.372.102.418,00	89,15	11.341.475.817,00
5.2	BELANJA MODAL	1.730.991.890,00	1.460.630.903,00	84,38	1.071.224.200,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.730.991.890,00	1.460.630.903,00	84,38	713.143.200,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	358.081.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.174.283.754,00)	(26.754.393.442,00)	91,71	(25.756.366.324,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(29.174.283.754,00)	(26.754.393.442,00)	91,71	(25.756.366.324,00)

Jambi, 31 Desember 2021
Pegguna Anggaran

FERDIANSYAH, S.STP, MA
NIP. 198007011999121001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	439.580.971,44	0,00	439.580.971,44	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	439.580.971,44	0,00	439.580.971,44	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	439.580.971,44	0,00	439.580.971,44	0,00
8	BEBAN	25.485.512.223,53	25.033.947.433,60	451.564.789,93	1,80
8.1.1	Beban Pegawai	13.921.660.121,00	13.343.666.307,00	577.993.814,00	4,33
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	10.947.597.625,00	11.342.254.647,00	(394.657.022,00)	(3,48)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	539.680.416,53	310.094.840,56	229.585.575,97	74,04
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.074.811,00	37.432.389,04	38.642.421,96	103,23
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	499.250,00	499.250,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4¹ Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(25.045.931.252,09)	(25.033.947.433,60)	(11.983.818,49)	0,05
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(25.045.931.252,09)	(25.033.947.433,60)	(11.983.818,49)	0,05
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(25.045.931.252,09)	(25.033.947.433,60)	(11.983.818,49)	0,05

Jambi, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran



FERDIANSYAH, S.STP, MA

NIP. 198007011999121001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan		
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi		
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	2.611.026.718,01	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(25.045.931.252,09)	(25.033.947.433,60)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN.MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(78.779.020,98)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	26.754.393.442,00	0,00
EKUITAS AKHIR	4.240.709.886,94	(25.033.947.433,60)

Jambi, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

FERDIANSYAH, S.STP, MA

NIP. 198007011999121001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
16. Peraturan Gubernur Jambi No. 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB III. Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, dan
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat berkomitmen dengan visi "Terwujudnya aparaturnya pengawasan yang profesional dan berintegritas, didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
- c. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- d. Inspektur Pembantu I;
- e. Inspektur Pembantu II;
- f. Inspektur Pembantu III;
- g. Inspektur Pembantu IV;
- h. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- i. Jabatan Fungsional.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2020 dan pada tahun 2021.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2021 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2021.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

2.3. Pencapaian Target Keuangan

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/		JUMLAH DPA		PERKEMBANGAN PELAKSANAAN	
	URAIAN KEGIATAN	APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	REALISASI KEUANGAN		
				Rp.	%	
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI						
BELANJA LANGSUNG		19.814.519.943,00	14.510.554.943,00	12.832.733.321,00	88,44	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		196.778.580,00	239.879.212,00	176.856.012,00	73,73	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.818.726,00	108.658.306,00	71.593.806,00	65,89	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.959.854,00	131.220.906,00	105.262.206,00	80,22	
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.452.344.632,00	1.674.858.860,00	1.600.901.059,00	95,58	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.452.344.632,00	1.674.858.860,00	1.600.901.059,00	95,58	
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.872.483.883,00	1.865.602.289,00	1.793.322.800,00	96,13	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.815.045,00	31.815.045,00	31.815.045,00	100,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.477.118,00	88.477.118,00	88.475.064,00	100,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.955.000,00	142.976.000,00	124.139.335,00	86,83	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.660.400,00	124.660.400,00	110.987.900,00	89,03	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.927.920,00	25.927.920,00	3.240.000,00	12,50	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.428.648.400,00	1.451.745.806,00	1.434.665.456,00	98,82	
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.441.021.369,00	1.727.002.289,00	1.458.155.903,00	84,43	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.230.000,00	43.982.400,00	37.000.000,00	84,12	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.411.791.369,00	1.683.019.889,00	1.421.155.903,00	84,44	
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		576.806.194,00	576.806.194,00	455.494.602,00	78,97	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.535.820,00	65.535.820,00	53.823.100,00	26,11	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.265.170,00	255.265.170,00	196.635.899,00	23,34	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.120.000,00	18.120.000,00	21.225.000,00	30,08	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.885.204,00	237.885.204,00	183.810.603,00	18,23	
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.103.492.800,00	1.038.052.745,00	936.267.030,00	90,19	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.580.000,00	181.319.945,00	154.610.830,00	85,27	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.950.000,00	216.210.000,00	208.506.700,00	96,44	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.732.800,00	150.292.800,00	83.744.500,00	55,72	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	490.230.000,00	490.230.000,00	489.405.000,00	99,83	

8 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		6.306.122.093,00	4.895.450.202,00	4.713.560.220,00	96,28
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.995.951.660,00	1.902.550.813,00	1.851.346.200,00	97,31
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	856.829.060,00	906.437.157,00	871.326.600,00	96,13
3	Reviu Laporan Kinerja	349.630.253,00	175.165.060,00	166.354.000,00	94,97
4	Reviu Laporan Keuangan	528.021.160,00	365.516.760,00	353.834.600,00	96,80
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	998.486.160,00	493.375.012,00	488.033.400,00	98,92
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.577.203.800,00	1.052.405.400,00	982.665.420,00	93,37
9 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		1.049.001.372,00	804.142.572,00	738.431.800,00	91,83
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	64.475.360,00	2.276.856,00	2.276.800,00	100,00
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	984.526.012,00	801.865.716,00	736.155.000,00	91,81
10 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		513.155.120,00	263.011.760,00	145.134.920,00	55,18
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	271.045.060,00	58.534.700,00	57.957.860,00	99,01
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	242.110.060,00	204.477.060,00	87.177.060,00	42,63
11 Pendampingan dan Asistensi		2.303.313.900,00	1.425.748.820,00	814.608.975,00	57,14
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.357.545.660,00	825.026.820,00	524.597.775,00	63,59
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	160.023.660,00	-	-	0,00
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	648.825.520,00	496.962.000,00	238.871.200,00	48,07
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	136.919.060,00	103.760.000,00	51.140.000,00	49,29
BELANJA TIDAK LANGSUNG		16.413.271.838,00	14.686.888.811,00	13.921.660.121,00	94,79
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.506.911.838,00	14.280.328.811,00	13.612.600.121,00	95,32
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.506.911.838,00	14.280.328.811,00	13.612.600.121,00	95,32
		906.360.000,00	406.560.000,00	309.060.000,00	76,02
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	898.200.000,00	398.400.000,00	302.940.000,00	76,04
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	6.120.000,00	75,00
JUMLAH		36.227.791.781,00	29.174.283.754,00	26.754.393.442,00	91,71

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

b. Persediaan

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo

akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya
 - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
 - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Pos Aset Lainnya pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Pos Kewajiban pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

3.6. Kebijakan Akuntansi Beban

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran murni -Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021 Sebesar Rp.36.227.791.782,00 Perubahan Anggaran Berkurang sebesar Rp.7.053.508.028,00 sehingga Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp 29.174.283.754.00 Rincian Pagu Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu		Bertambah/Berkurang
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)	
BELANJA			
BELANJA OPERASI	33.782.780.812,00	27.443.291.864,00	(6.339.488.948,00)
Belanja Pegawai	16.413.271.839,00	14.686.888.811,00	(1.726.383.028,00)
Belanja Barang dan Jasa	17.369.508.973,00	12.756.403.053,00	(4.613.105.920,00)
BELANJA MODAL	2.445.010.970,00	1.730.991.890,00	(714.019.080,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.445.010.970,00	1.730.991.890,00	(714.019.080,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0	
TOTAL BELANJA	36.227.791.782,00	29.174.283.754,00	(7.053.508.028,00)

sedangkan dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.413.271.838,00	14.686.888.811,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.778.580,00	239.879.212,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.452.344.632,00	1.674.858.860,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.872.483.883,00	1.865.602.289,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.441.021.369,00	1.727.002.289,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.806.194,00	553.646.194,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.492.800,00	1.038.052.745,00

Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.306.122.093,00	4.895.450.202,00
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.049.001.372,00	804.142.572,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	513.155.120,00	263.011.760,00
Pendampingan dan Asistensi	2.303.313.900,00	1.425.748.820,00
JUMLAH	36.227.791.782,00	29.174.283.754,00

4.1.1. Pendapatan LRA

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.1.2. Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan di Inspektorat Provinsi Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 29.174.283.754,00 telah direalisasikan 91,71% sebesar Rp 26.754.393.442,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
5	BELANJA	29.174.283.754,00	26.754.393.442,00	91,71
5.1	Belanja Operasi	27.443.291.864,00	25.293.762.539,00	92,17
5.1.1	Belanja Pegawai	14.686.888.811,00	13.921.660.121,00	94,79
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.756.403.053,00	11.372.102.418,00	89,15
5.2	Belanja Modal	1.730.991.890,00	1.460.630.903,00	84,38
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.730.991.890,00	1.460.630.903,00	84,38
JUMLAH		29.174.283.754,00	26.754.393.442,00	91,71

Realisasi Belanja tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 998.027.118,00 di bandingkan tahun anggaran 2020 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Rp
	TA 2021	TA 2020	
BELANJA OPERASI	25.293.762.539,00	24.685.142.124,00	608.620.415,00
Belanja Pegawai	13.921.660.121,00	13.343.666.307,00	577.993.814,00
Belanja Barang dan Jasa	11.372.102.418,00	11.341.475.817,00	30.626.601,00
BELANJA MODAL	1.460.630.903,00	1.071.224.200,00	389.406.703,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.460.630.903,00	713.143.200,00	747.487.703,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	358.081.000,00	-358.081.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	
Jumlah	26.754.393.442,00	25.756.366.324,00	998.027.118,00

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 adalah Rp. 14.686.888.811,00 dan 13.921.660.121,00 tercapai 94,79% disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	14.686.888.811,00	13.921.660.121,00	94,79

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 13.921.660.121,00 dan Rp 13.343.666.307,00. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 577.993.814,00 atau 1,04 %, karena penambahan pegawai pada tahun yang berjalan. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2021	TA 2020	Rp	%
Belanja Pegawai	13.921.660.121,00	13.343.666.307,00	577.993.814,00	1,04%

b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	12.756.403.053,00	11.372.102.418,00	89,15

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 12.756.403.053,00 dan Realisasi Rp 11.372.102.418,00 atau 89,15% dan Kenaikan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 30.626.601,00 atau 1.00 %. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2021	TA 2020	Rp	%
Belanja Barang dan Ja	11.372.102.418,00	11.341.475.817,00	30.626.601,00	1,00

4.1.2.2. Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.730.991.890,00	1.460.630.903,00	84,38

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.730.991.890,00 dan Rp 1.460.630.903,00 atau 84,38% Kenaikan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 747.487.703,00 atau 137,26 %. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2021	TA 2020	Rp	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.460.630.903,00	713.143.200,00	747.487.703,00	2,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	358.081.000,00	-358.081.000,00	0,00
Jumlah	1.460.630.903,00	1.071.224.200,00	389.406.703,00	1,36

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021				
1	Meja Kubikal 28 unit dan laci Drawer 20 unit	Dell / Vestro 3490	60 Unit	314.444.000
2	Video Interactive 2 (Dua) Unit	Apple gen 7 128 GB	2 Unit	454.000.000
3	Laptop 7 (Tujuh) Unit	Lenovo V 330	7 Unit	190.162.000
4	AC 3 unit	Lenovo Aio	3 Unit	16.042.083
5	Penghancur kertas 4 unit	Secure Maxi 24 Strip	4 Unit	16.911.000
6	Motor roda 3, 1 unit	Shap	1 Unit	37.000.000
7	Vacum cleaner 1 unit	Shap	1 Unit	2.860.000
8	Mesin rumput 1 unit	-	1 Unit	2.475.000
9	Alat ukur digital 3 unit	-	3 Unit	6.900.000
10	Mobile Drawer 3 Laci sebanyak 60 unit	Mobile Drawer	60 Unit	111.240.000
11	Meja kubikal FLWS sebanyak 20 unit	Kubikal FLWS	20 unit	112.270.000
12	Printer Canon G1010 sebanyak 82 unit	Canon G1010	82 Uinit	141.994.820
13	laptop 2 unit	Lenovvo	2 Unit	54.332.000
	JUMLAH			1.460.630.903

4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

4.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.407.500,00 dan Rp 541.600,00. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Keterangan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lancar:		
Persediaan	1.407.500,00	541.600,00
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah	1.407.500,00	541.600,00

4.2.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp 1.407.500,00 dan Rp 541.600,00. Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. dikarenakan terdapat penurunan nilai Persediaan sebesar Rp 1.295.600,00. Rincian persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	ATK	1.407.500,00	278.100,00
2	Alat Kebersihan	-	263.500,00
	Jumlah	1.407.500,00	541.600,00

4.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.255.705.743,94 dan Rp 1.833.125.677,61 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	8.919.621.127,92	7.458.990.224,90
2	Gedung dan Bangunan	4.191.298.523,44	3.327.112.552,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.970.000,00	19.970.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	23.815.909,00	23.815.909,00
	Akumulasi Penyusutan	(8.898.999.816,42)	(8.996.763.008,29)
	JUMLAH ASET TETAP	4.255.705.743,94	1.833.125.677,61

4.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 8.919.621.127,92 dan Rp 7.458.990.224,90. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp 1.460.630.903,00 dan terdapat penyesuaian sebesar 0,2. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.898.999.816,42 sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7.458.990.224,90
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.460.630.903,00
Penyesuaian	0,2
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	8.919.621.127,92
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	6.439.040.914,26
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.480.580.213,66

4.2.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.191.298.523,44 dan 3.327.112.552,00. Terdapat penambahan sebesar Rp. 864.185.971,44 dengan rincian belanja modal gedung bangunan sebesar Rp.424.605.000,00 adalah Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa dan mutasi dari Dinas PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. BA-1417/DPUPR-1.3/VI/2021 sebesar Rp.439.580.971,44. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.452.470.152,16. sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 1.738.828.371,28.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3.327.112.552,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Gedung Bangunan	424.605.000,00
Mutasi dari Dinas PUPR	439.580.971,44
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.191.298.523,44
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	2.452.470.152,16
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.738.828.371,28

No	Nama Rehab	Nilai (Rp)
1	Rehabilitasi Parkir Motor	145.577.000,00
2	Renovasi Interior Lobby	196.531.000,00
3	Rehabilitasi Taman Belakang dan Lapangan Olahraga	82.497.000,00
	JUMLAH	424.605.000,00

4.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 19.970.000,00 dan Rp19.970.000,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.488.750,00 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 12.481.250,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	19.970.000,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	7.488.750,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	12.481.250,00

4.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 23.815.909,00 dan Rp23.815.909,00. Aset Tetap Lainnya merupakan koleksi buku perpustakaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

4.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 8.898.999.816,42 dan Rp 8.996.763.008,29. Nilai Akumulasi penyusutan tahun 2021 dilakukan penyesuaian dengan melakukan pemisahan senilai 792.796.690,40 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain.

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.439.040.914,26
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.452.470.152,16
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.488.750,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	792.796.690,40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	9.691.796.506,82

4.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 792.796.690.40 dan Rp 792.796.690.40. Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	792.796.690.40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	726.346.690.40
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0,00

4.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 16.403.357,00 dan Rp 15.437.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Belanja Air	699.500,00	2.859.600,00
2	Belanja Telepon	699.500,00	1.798.746,00
3	Belanja Listrik	15.595.534,00	10.778.904,00
Jumlah		16.403.357,00	15.437.000,00

4.2.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.240.709.886,94 dan Rp 2.611.026.718,01 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.3.2. Beban

Jumlah Beban tahun 2021 dan 2020 masing-masing Rp 25.485.512.223,53 dan Rp 25.033.947.433,60. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2021 dan 2020 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2021	2020	Jumlah	%
Beban Pegawai-LO	13.921.660.121,00	13.343.666.307,00	577.993.814,00	4,33
Beban Barang dan Jasa	10.947.597.625,00	11.342.254.647,00	(394.657.022)	(3,48)
Beban Penyusutan Mesin	539.680.416,53	310.094.840,56	229.585.575,97	74,04
Beban Penyusutan Gedung	76.074.811,00	37.432.389,04	38.642.421,96	103,23
Beban Penyusutan jalan, Jaringan dan Irigasi	499.250,00	499.250,00	0,00	0,00
Jumlah	25.485.512.223,53	25.033.947.433,60	451.564.789,93	1,80

4.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 13.921.660.121,00 dan Rp 13.343.666.307,00 Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 10.947.597.625,00 dan Rp. 11.342.254.647,00, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 539.680.416,53 dan Rp. 310.094.840,56, Beban Penyusutan Gedung Rp. 76.074.811,00 dan Rp. 37.432.389,04 dan beban penyusutan jalan Jaringan dan Irigasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RP. 499.250,00 dan Rp. 499.250,00.

4.3.3. Surplus/Defisit-LO

Surplus Defisit tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 25.045.931.252 dan Rp 25.033.947.433,60. Kenaikan/ Penurunan sebesar 11.983.818,49

4.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 adalah Rp.2.611.026.718,01 dan Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.25.045.931.252,09 dan Rp.25.033.947,433,60. Koreksi Ekuitas Tahun 2021 (78.7779.020,98)

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2021 Rp. 26.754.393.442,00 Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.240.709.886,94.

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan handal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 secara keseluruhan.

Inspektur,



H.AGUS HERIANTO,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : FERDIANSYAH, S.STP, MA
Bendahara Pengeluaran : HASIAN HARAHAP, SE
Bulan : December

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	5.254.955.758,00	4.824.829.100,00	373.724.300,00	5.198.553.400,00	5.198.553.400,00	56.402.358,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	574.224.616,00	0,00	0,00	0,00	514.052.933,00	60.171.683,00
			476.587.375,00	37.465.558,00	514.052.933,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	143.771.978,00	0,00	0,00	0,00	87.110.000,00	56.661.978,00
			80.990.000,00	6.120.000,00	87.110.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	805.274.874,00	0,00	0,00	0,00	761.550.000,00	43.724.874,00
			707.500.000,00	54.050.000,00	761.550.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97.810.608,00	0,00	0,00	0,00	47.545.000,00	50.265.608,00
			44.420.000,00	3.125.000,00	47.545.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	291.929.264,00	0,00	0,00	0,00	290.042.100,00	1.887.164,00
			269.112.720,00	20.929.380,00	290.042.100,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.998.732,00	0,00	0,00	0,00	15.926.020,00	1.072.712,00
			14.684.477,00	1.241.543,00	15.926.020,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 08 . 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	74.200,00	0,00	0,00	0,00	68.950,00	5.250,00
			64.050,00	4.900,00	68.950,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 09 . 01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	547.333.664,00	0,00	0,00	0,00	545.838.511,00	1.495.153,00
			526.859.117,00	18.979.394,00	545.838.511,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 10 . 01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.140.480,00	0,00	0,00	0,00	10.681.508,00	2.458.972,00
			9.784.576,00	896.932,00	10.681.508,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 11 . 01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	41.908.716,00	0,00	0,00	0,00	32.042.399,00	9.866.317,00
			29.351.583,00	2.690.816,00	32.042.399,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 12 . 01	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	30.276.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276.591,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 17 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.462.629.330,00	0,00	0,00	0,00	6.107.149.300,00	355.480.030,00
			5.077.857.187,00	1.029.292.113,00	6.107.149.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 24 . 01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	398.400.000,00	0,00	0,00	0,00	302.940.000,00	95.460.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			227.708.000,00	75.232.000,00	302.940.000,00		
5 . 1 . 1 . 24 . 02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.120.000,00	2.040.000,00	8.160.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	900.000,00	2.700.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	275.000,00	275.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	180.338.318,00	0,00	0,00	0,00	166.845.144,00	13.493.174,00
			0,00	0,00	0,00		
			133.083.863,00	33.761.281,00	166.845.144,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.753.300,00	0,00	0,00	0,00	27.676.400,00	1.076.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.251.900,00	13.424.500,00	27.676.400,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	263.688.980,00	0,00	0,00	0,00	241.238.580,00	22.450.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			163.924.480,00	77.314.100,00	241.238.580,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	6.690.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			810.000,00	0,00	810.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	89.408.312,00	0,00	0,00	0,00	86.287.312,00	3.121.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			69.252.084,00	17.035.228,00	86.287.312,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	32.006.325,00	0,00	0,00	0,00	32.006.325,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.815.045,00	191.280,00	32.006.325,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	18.525.000,00	3.225.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.200.000,00	2.325.000,00	18.525.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.118.923,00	0,00	0,00	0,00	35.118.923,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.670.141,00	6.448.782,00	35.118.923,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	266.584.000,00	0,00	0,00	0,00	145.120.455,00	121.463.545,00
			0,00	0,00	0,00		
			136.015.655,00	9.104.800,00	145.120.455,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	65.130.000,00	0,00	0,00	0,00	46.405.735,00	18.724.265,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.813.385,00	8.592.350,00	46.405.735,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	29.882.160,00	0,00	0,00	0,00	29.882.160,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.882.160,00	0,00	29.882.160,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	125.800.000,00	0,00	0,00	0,00	85.555.520,00	40.244.480,00
			0,00	0,00	0,00		
			85.555.520,00	0,00	85.555.520,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	425.578.000,00	0,00	0,00	0,00	379.669.000,00	45.909.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			238.202.000,00	141.467.000,00	379.669.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.550.000,00	4.050.000,00	48.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 04 . 28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	275.400.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000.000,00	32.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			222.750.000,00	20.250.000,00	243.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 36	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 60	Belanja Tagihan Air	20.137.200,00	0,00	0,00	0,00	11.875.200,00	8.262.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.253.700,00	621.500,00	11.875.200,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 61	Belanja Tagihan Listrik	163.508.970,00	0,00	0,00	0,00	141.662.699,00	21.846.271,00
			0,00	0,00	0,00		
			126.452.900,00	15.209.799,00	141.662.699,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	48.177.920,00	0,00	0,00	0,00	20.240.000,00	27.937.920,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.930.000,00	8.310.000,00	20.240.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	61.098.000,00	0,00	0,00	0,00	56.347.500,00	4.750.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			46.216.907,00	10.130.593,00	56.347.500,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 64	Belanja Paket/Pengiriman	9.435.820,00	0,00	0,00	0,00	4.413.100,00	5.022.720,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.295.100,00	118.000,00	4.413.100,00		
5 . 2 . 1 . 15 . 01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	693.606.000,00	0,00	0,00	0,00	689.015.000,00	4.591.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			620.015.000,00	69.000.000,00	689.015.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 19 . 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.860.000,00	0,00	0,00	0,00	21.203.000,00	1.657.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.530.000,00	4.673.000,00	21.203.000,00		
5 . 2 . 1 . 19 . 36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	374.669.945,00	0,00	0,00	0,00	341.914.530,00	32.755.415,00
			0,00	0,00	0,00		
			257.857.880,00	84.056.650,00	341.914.530,00		
5 . 2 . 1 . 19 . 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	70.755.000,00	0,00	0,00	0,00	22.150.000,00	48.605.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.350.000,00	7.800.000,00	22.150.000,00		
5 . 2 . 1 . 19 . 21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.463.800,00	0,00	0,00	0,00	15.430.000,00	33.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.430.000,00	0,00	15.430.000,00		
5 . 2 . 1 . 19 . 05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	45.990.000,00	0,00	0,00	0,00	32.915.000,00	13.075.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.370.000,00	9.545.000,00	32.915.000,00		
5 . 2 . 1 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	425.430.000,00	0,00	0,00	0,00	424.605.000,00	825.000,00
			0,00	424.605.000,00	424.605.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.348.513.080,00	0,00	0,00	0,00	5.860.656.235,00	487.856.845,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.075.205.334,00	785.450.901,00	5.860.656.235,00		
5 . 2 . 1 . 23 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	27.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.411.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.098.259.600,00	313.290.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.787.159.600,00	311.100.000,00	2.098.259.600,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 23 . 04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106.404.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	75.204.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.200.000,00	0,00	31.200.000,00		
5 . 2 . 3 . 03 . 16	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	19.792.500,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	12.892.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.900.000,00	0,00	6.900.000,00		
5 . 2 . 3 . 04 . 05	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	43.982.400,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	6.982.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	185.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.276,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	844.352.234,00	0,00	0,00	0,00	718.236.903,00	126.115.331,00
			679.948.820,00	0,00	679.948.820,00		
			38.288.083,00	0,00	38.288.083,00		
5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 21 . 05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	244.494.000,00	0,00	0,00	0,00	244.494.000,00	0,00
			190.162.000,00	0,00	190.162.000,00		
			0,00	54.332.000,00	54.332.000,00		
5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Elektronik/Electric	578.091.730,00	0,00	0,00	0,00	454.000.000,00	124.091.730,00
			454.000.000,00	0,00	454.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		29.174.283.754,00	4.824.829.100,00	373.724.300,00	5.198.553.400,00	26.755.893.442,00	2.418.390.312,00
			8.561.321.905,00	1.599.400.636,00	10.160.722.541,00		
			9.620.858.737,00	1.775.758.764,00	11.396.617.501,00		

Penerimaan

- SP2D	27.322.399.625,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	63.674.600,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	9.718.889,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	2.808.401,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	71.907.242,00
- Lain-lain	0,00

Jumlah Penerimaan 27.470.508.757,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	26.755.893.442,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	63.674.600,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	9.718.889,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	2.808.401,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	71.907.242,00
- Lain-lain	566.506.183,00

Jumlah Pengeluaran 27.470.508.757,00

Saldo Kas 0,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



FERDIANSYAH, S.STP, MA

NIP. 198007011999121001

Jambi, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENGELUARAN



HASIAN HARAAP, SE

NIP. 19860110 201001 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. H. Agus Salim No.2 Kota Baru
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115 Fax. (0741) 446721, 446726
JAMBI 36137

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI KEPADA
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
Nomor : BA- 1417 /DPUPR-1.3/VI/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. MUHAMMAD FAUZI MT
NIP : 19640304 199203 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi (selaku Pengguna Barang), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : FERDIANSYAH, S.STP, M.A.
NIP : 19800701 199912 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektur Provinsi Jambi (selaku Pengguna Barang), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** beberapa hasil pekerjaan berupa Rehabilitasi Pagar Kantor Inspektorat Provinsi Jambi sejumlah : **Rp.439.580.971,-** (*Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah.*) dengan rincian objek pekerjaan sebagaimana daftar terlampir.
2. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab atas administrasi dan hasil pekerjaan tersebut beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Berita Acara Serah Terima ini dilakukan untuk tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jambi dan **PIHAK KEDUA** segera melakukan pencatatan dan mengkapitalisasi hasil pekerjaan tersebut ke dalam Buku Inventaris **PIHAK KEDUA** sesuai dengan aset induknya.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 22 Juni 2021

PIHAK KEDUA,
Pit. INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,



FERDIANSYAH, S.STP, M.A.
Pembina
NIP. 19800701 199912 1 001

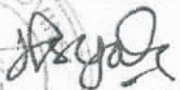
PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI JAMBI,



Ir. MUHAMMAD FAUZI MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

Daftar Hasil Pekerjaan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jambi
 Yang di serahkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Kepada Inspektorat Provinsi Jambi

Nomor		Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Kondisi (B,RR,R B)	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang							Barang	Harga (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen Lainnya	Pembangunan Pagar Kantor Inspektorat Provinsi Jambi	APBD	2012		B	1	439.580.971,44	
JUMLAH								1	439.580.971	

PIHAK KEDUA,
 Pjt. INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

 FERDIANSYAH, SSTP, M.A.
 Pembina
 NIP. 19800701 199912 1 001

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI,

 K. MUHAMMAD FAUZI MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640304 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. M.T. Haryono No.2 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 61606. Fax (0741) 62317

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
SEMESTER II TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua menerangkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan Rekonsiliasi tentang Neraca Keuangan dan Barang Milik Daerah Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Neraca Barang Milik OPD		Neraca Keuangan	Ket.
I	Aset Tetap				
1	Tanah	-	-	-	
2	Peralatan dan Mesin	1.320	8.919.621.127,92	8.919.621.127,92	Dokumen Lengkap
3	Gedung dan Bangunan	11	4.191.298.523,44	4.191.298.523,44	Dokumen Lengkap
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	19.970.000,00	19.970.000,00	Dokumen Lengkap
5	Aset Tetap Lainnya	251	23.815.909,00	23.815.909,00	Dokumen Lengkap
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
JUMLAH I		1.583	13.154.705.560,36	13.154.705.560,36	Dokumen Lengkap
	Akumulasi Penyusutan		8.898.999.816,42	8.898.999.816,42	Dokumen Lengkap
II	Aset Lainnya				
8	Aset Lain-lain	415	792.796.690,40	792.796.690,40	Dokumen Lengkap
9	Akumulasi Amortasi ATB				
10	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		792.796.690,40	792.796.690,40	Dokumen Lengkap
JUMLAH II		415	792.796.690,40	792.796.690,40	Dokumen Lengkap
JUMLAH I + II		1.998	13.947.502.250,76	13.947.502.250,76	Dokumen Lengkap

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani.

Pihak Kedua
Kabid Pengelolaan BMD
BPKPD Provinsi Jambi

PUJIMAHWITO, SE, MAP
Pembina
NIP.19780106 200604 1 011

Pihak Pertama
Pengurus Barang
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

IIS JAMA' AHMADI, SE
Penata
NIP. 19870515 200601 1 006